

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang sekaligus merupakan proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk tujuan nasional (Roza & Arliman, 2017). Tujuan dilaksanakannya pembangunan nasional ialah mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berkedaulatan rakyat (Wiguna dkk, 2017)

Titik berat pembangunan diletakkan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan seiring dengan kualitas sumberdaya manusia dan di dorong secara saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan pembangunan bidang-bidang lainnya yang dilaksanakan selaras, serasi dan seimbang guna keberhasilan pembangunan dibidang ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan serta mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional (Syafuruddin, 2020). Untuk mewujudkan tujuan Nasional tersebut, perlu upaya-upaya pembangunan yang terarah. Terencana, terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan. Salah satu upaya Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan pembangunan Nasional yaitu dimulai dari pembangunan desa (Deswimar, 2015)

Desa merupakan agen pemerintah terdepan yang dapat menjangkau kelompok sasaran riil yang hendak kesejahteraan. Pembangunan desa bertujuan untuk memberi peluang bagi daerah dan pedesaan sebagai tulang punggung ekonomi Regional dan Nasional (Pramida & Ratnasari, 2022).

Menurut Hagul, Peter (2001) Pembangunan desa pada hakekatnya merupakan upaya untuk memerangi kemiskinan. Selaras dengan Undang-undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 tentang desa, menyebutkan pembangunan desa memiliki tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pembangunan desa tentunya akan dikaitkan pada potensi yang dimiliki masyarakat desa. Namun seringkali pengelolaan potensi tersebut belum terorganisir dan tidak mampu menggali potensi baik sumber daya alam dan sumber daya manusia. Salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan dan menggerakkan perekonomian rakyat, pemerintah Indonesia melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pembangunan desa membentuk suatu badan keuangan yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Laru & Suprojo, 2019). Menurut Adisasmita (2006) Badan Usaha Milik Desa merupakan usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilalukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

UU No 6 tahun 2014 tentang desa Bab1 Pasal 1 menyebutkan bahwa BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Sehingga, dapat dikatakan bahwa BUMDes menjadi suatu alternatif untuk mengelola seluruh aset serta potensi yang dimiliki oleh desa agar tercipta sumber pendapatan baru sekaligus mampu memenuhi kebutuhan dengan tujuan utama mensejahterakan masyarakatnya.

Hadirnya BUMDes merupakan salah satu simbol dari upaya untuk mewujudkan ekonomi desa yang mandiri. Berdirinya sebuah BUMDes berlandaskan pada kebutuhan dan potensi dari desa itu sendiri, dimana dalam prosesnya terdapat sebuah hasrat akan sebuah kemajuan pada masyarakat desa (Rismanita & Pradana, 2022).

BUMDes begitu penting bagi desa dan masyarakat, perannya akan begitu membantu dan memberikan manfaat. Ketika desa memiliki BUMDes banyak hal yang bisa dibangun guna meningkatkan perekonomian desa. Keberadaan usaha-usaha dalam wadah BUMDes akan menyerap tenaga kerja, terserapnya tenaga kerja akan memberikan pendapatan yang meningkat di masyarakat. Hal tersebut dapat menandai kemajuan desa di berbagai sektor dari potensi yang ada di desa (Prasetyo, 2016)

Kabupaten Sorong merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua Barat Daya dengan luas wilayah adalah 13.603 Km² yang terbagi dalam wilayah daratan seluas 8.457 Km² dan wilayah lautan seluas 5.146 Km². Potensi penggunaan lahan di Kabupaten Sorong terdiri dari lahan pertanian seluas 3.541 ha, perkebunan seluas 4.606 ha, hutan seluas 1.475.886,41 Ha. Kabupaten Sorong adalah wilayah yang mengembangkan sektor pertanian dalam pertumbuhan ekonomi rakyat khususnya di Desa Walal.

Desa Walal mempunyai BUMDes yang bernama BUMDes Lestari Jaya yang terbentuk pada Tahun 2017. Fungsi dari BUMDes Lestari Jaya ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan kampung Walal yang mempunyai potensi desa yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan kualitas

perekonomian masyarakatnya, diantaranya potensi pengolahan lahan yang kosong untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, perdagangan, simpan pinjam tanpa adanya bahan jaminan dan mengandalkan kepercayaan serta kegiatan lainnya yang bersifat memajukan aktivitas ekonomi kerakyatan masyarakatnya.

Persepsi sebagai suatu proses yang dimulai dari penglihatan hingga terbentuk tanggapan yang terjadi dalam individu sehingga sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui Indera yang dimilikinya. Persepsi terjadi ketika seseorang mendapatkan informasi melalui inderanya (Pratiwi dkk, 2019). Langkah yang diperlukan dalam usaha pengembangan pembangunan desa tersebut adalah dengan mengikutsertakan semua elemen masyarakat desa dengan partisipatif aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pemanfaatan hasilnya. Tentunya membutuhkan partisipasi yang tinggi dari petani sekitar wilayah agar berjalan dengan semakin baik karena petani sebagai stake holder yang langsung berperan aktif dalam kegiatan pelaksanaan program BUMDes yang akan berdampak bagi perekonomian masyarakat pedesaan dalam mewujudkan kesejahteraan.

Berdasarkan latar belakang maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Persepsi dan Partisipasi Petani Terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) (Studi Kasus Pada BUMDES Lestari Jaya di Desa Walal Distrik. Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya)

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Usaha apa saja yang dikembangkan BUMDes Lestari Jaya di Desa Walal Distrik Salawati, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya?
2. Bagaimana persepsi petani terhadap BUMDes Lestari Jaya?
3. Bagaimana partisipasi petani dalam BUMDes Lestari Jaya?
4. Bagaimana pengaruh persepsi petani terhadap partisipasi dalam BUMDes Lestari Jaya?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan usaha yang dikembangkan BUMDes Lestari Jaya di Desa Walal Distrik Salawati, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.
2. Menganalisis persepsi petani terhadap BUMDes Lestari Jaya.
3. Menganalisis partisipasi petani terhadap BUMDes Lestari Jaya
4. Menganalisis pengaruh persepsi petani terhadap partisipasi dalam BUMDes Lestari Jaya.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini yaitu:

1. Menjadi bahan masukan bagi pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan BUMDes agar tercapai Visi dan Misi di Desa Walal Distrik Salawati, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Serta menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya untuk meneliti BUMDes.
2. Untuk menambah pengetahuan masyarakat terkait kegiatan BUMDes bagi masyarakat desa.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 BUMDes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) secara etimologi berasal dari beberapa kata yaitu badan usaha yang diartikan kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan sedangkan milik dapat diartikan sebagai kepemilikan atau kepunyaan sementara Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintah sendiri (KBBI). Badan Usaha Milik Desa yang disingkat menjadi BUMDes merupakan suatu lembaga/usaha yang dikelola pemerintah dan masyarakat desa yang bertujuan untuk memperkuat perekonomian desa (Hidete dkk, 2022).

Definisi BUMDes Menurut Hailudin (2021) BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Jadi BUMDes merupakan suatu usaha/lembaga yang memiliki fungsi untuk membangun perekonomian desa melalui usaha yang dikembangkan dalam rangka memperoleh suatu hasil (keuntungan atau laba).

Definisi yang disematkan pada BUMDes dalam UU Desa yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan

masyarakat Desa (Ridlwan, 2015). Menurut Pasal 213 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga (Pradyani, 2019).

Kemudian di jelaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 1 ayat (6) yang menyatakan bahwa BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat (Pradyani, 2019).

BUMDes merupakan suatu lembaga yang dipercaya sebagai badan usaha yang mampu membantu pemerintah dan masyarakat desa untuk mengembangkan sekaligus memenuhi kebutuhan sehari-hari, menjadi peluang usaha, menambah wawasan masyarakat desa baik dengan cara mengembangkan potensi desa maupun memanfaatkan sumber daya alam desa. BUMDes dapat menjadi pertimbangan untuk menyalurkan inisiatif masyarakat desa, potensi desa, mengelola dan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) desa serta mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (Warga Desa) (Supriyadi, 2022).

Keberadaan BUMDes secara umum dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian desa serta untuk memperkuat perekonomian desa, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Mengingat dengan adanya BUMDes, desa diberikan hak penuh untuk mengelola dan mengembangkan potensi desa tanpa intruksi dari pemerintah dan kelompok tertentu. Oleh sebab itu pemerintah dan masyarakat desa dituntut untuk mandiri. Dalam hal ini untuk menopang sifat kemandirian dari pemerintah dan masyarakat desa maka diperlukan *prinsipprinsip kooperatif, partisipatif dan emansipatif, transparansi*, serta sustainable agar BUMDes dapat dijalankan dengan baik dan optimal, selain itu harus didasarkan oleh kemauan (kesepakatan) masyarakat banyak serta kemampuan setiap anggota untuk lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, baik untuk kepentingan produksi dan konsumen (Supriyadi, 2022).

Terciptanya Badan Usaha Milik Desa dikarenakan, sudah dititikberatkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah, desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa. Sebagai lembaga komersial dengan institusi sosial ekonomi BUMDes harus mampu berkompetensi ke luar desa serta harus berpihak pada pemenuhan kebutuhan masyarakat baik dari segi prokduktif maupun konsumtif dengan pelayanan distribusi penyediaan barang dan jasa, yakni hal ini mampu diwujudkan dalam pengadaan kebutuhan masyarakat yang tidak memberatkan seperti harga yang lebih murah dan mudah didapatkan dan lebih menguntungkan, tetapi dalam hal ini BUMDes harus tetap memperhatikan efisiensi serta efektifitas dalam kegiatan sektor riil dan lembaga keuangan yang

berlaku sebagai lembaga keuangan mikro. Terdapat 7 (tujuh) ciri utama BUMDes pada umumnya yaitu (Ridlwan. 2015):

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara Bersama
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil)
3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya local (*local wisdom*)
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar
5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*)
6. Difasilitasi oleh pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes
7. Pelaksanaan operasionalisasinya dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).

Pemaparan diatas, peneliti menyimpulkan bahwasanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan sebuah lembaga yang dibentuk dan didirikan oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa.

2.1.2 Peran BUMDes

Pengertian peran menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemain sandiwara atau perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.

Soekanto menjelaskan dalam penelitian (Nialda dkk, 2022) bahwa peran adalah bagian yang dimainkan seseorang atau tindakan yang dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa. Peranan atau peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan (status). Apabila seseorang yang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan

Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap sesuai dengan kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu (Agusliansyah, 2016).

Pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa peran adalah perilaku aktual seseorang yang menjalankan fungsi suatu hak dan kewajiban berdasarkan status yang dimiliki, serta suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu (Agusliansyah, 2016).

Makna dari kata peran adalah suatu penjelasan yang merujuk pada konotasi ilmu sosial, yang mengartikan peran sebagai fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Sedangkan pengertian peranan menurut Soerjono Soekanto adalah Peran (*role*) merupakan

aspek dinamis kedudukan(status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan (Raintung, 2021).

BUMDes sebagai lembaga berbentuk badan hukum yang menaungi berbagai unit usaha dalam desa dan juga memiliki peranan penting dalam peningkatan kesejahteraan Desa. Peran BUMDes terhadap peningkatan perekonomian desa, yaitu (Chikmawati, 2019):

1. Pembangunan dan pengembangan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan Masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDes sebagai pondasinya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa.
5. Membantu para masyarakat untuk meningkatkan penghasilan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran Masyarakat.

Jika dibuat perbandingan antara ketentuan BUMDes dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 dapat diketahui ketentuan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 lebih elaborative. UU Nomor 32 Tahun 2004 mengatur hanya dalam 1 pasal yaitu pasal 213, bahwa:

1. Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
2. Badan Usaha Milik Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
3. Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan.

Penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa peran merupakan tindakan dan perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, sedangkan peran BUMDes dalam sebuah desa berperan secara aktif dalam upaya mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa serta meningkatkan penghasilan sehingga dapat meningkat pendapatan dan kemakmuran masyarakat.

2.1.3 Tujuan dan Fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

1. Tujuan BUMDes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah suatu lembaga keuangan yang mana tujuan utamanya adalah untuk memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menjalankan suatu usahanya, selain itu BUMDes juga bisa mendirikan usaha-usaha untuk meningkatkan ekonomi masyarakat (Agunggunanto dkk, 2016).

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara koperatif, partisipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainabel. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efesien, professional dan mandiri. Empat tujuan utama

pendirian BUMDes adalah (Agunggunanto dkk, 2016).

1. Meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan lain yang sah.
2. Menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi masyarakat desa, dan unit-unit usaha desa
3. Menumbuhkembangkan usaha sektor informal untuk dapat menyerap tenaga kerja masyarakat di desa.
4. Meningkatkan kreaktifitas berwirausaha desa masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumsi) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberi pelayanan kepada non anggota (diluar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi dipedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes (Ridlwan, 2015)

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bertujuan sebagai lokomotif pembangunan ekonomi lokal tingkat desa. Pembangunan ekonomi lokal desa ini didasarkan oleh kebutuhan, potensi, kapasitas desa, dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa dengan tujuan akhir adalah meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa. Kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Dasar pembentukan BUMDes sebagai lokomotif pembangunan di desa lebih dilatar belakangi pada prakarsa pemerintah dan masyarakat desa dengan berdasarkan pada prinsip kooperatif, partisipatif, dan emantisipatif dari masyarakat desa. Di dalam buku panduan BUMDes yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2007 dijelaskan secara terperinci bahwa ada beberapa tahapan dalam proses pendirian BUMDes (Karim, 2019).

2. Fungsi BUMDes

BUMDes dapat berfungsi mewadahi berbagai usaha yang dikembangkan dipedesaan. Oleh karena itu didalam BUMDes dapat terdiri dari beberapa unit usaha yang berbeda-beda, ini sebagaimana yang ditunjukkan oleh struktur organisasi BUMDes yang memiliki 3 unit usaha yakni; unit perdagangan, unit jasa keuangan, dan unit produksi. Unit yang berada dalam struktur organisasi BUMDes secara umum dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu (Dewi, 2019):

1. Unit jasa keuangan misalnya menjalankan usaha simpan pinjam.
2. Unit usaha sektor riil/ekonomi misalnya menjalankan usaha pertokoan atau waserda, fotocopi, sablon, home industri, pengelolaan taman wisata desa, peternakan, perikanan, pertanian dan lain-lain

Pemaparan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa tujuan BUMDes yaitu untuk meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa, meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan sedangkan fungsi BUMDes yaitu untuk mewadahi berbagai usaha yang dikembangkan di pedesaan (Karim, 2019).

2.1.4 Persepsi

Secara etimologis, persepsi atau dalam bahasa Inggris *perception* berasal dari bahasa Latin *perceptio*, dari *percipere*, yang artinya menerima atau mengambil. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimulus inderawi (*sensory stimuli*) (Rosni, 2023).

Persepsi adalah proses pemahaman atau pemberian makna atas suatu informasi terhadap stimulus. Stimulus didapat dari proses penginderaan terhadap objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan antar gejala yang selanjutnya diproses oleh otak. Istilah persepsi biasanya digunakan untuk mengungkapkan tentang pengalaman terhadap suatu benda ataupun suatu kejadian yang dialami. Persepsi ini didefinisikan sebagai proses yang menggabungkan dan mengorganisir data-

data indra kita (pengindraan) untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga kita dapat menyadari di sekeliling kita, termasuk sadar akan diri kita sendiri. Persepsi berlangsung saat seseorang menerima stimulus dari dunia luar yang ditangkap oleh organ-organ (Abidin dkk, 2022).

Tunjungsari (2018) mengatakan persepsi adalah suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indra atau disebut proses sensoris. Proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi.

Aldila, Rokan (2023) persepsi terbentuk atas dasar data-data yang kita peroleh dari lingkungan yang diserap oleh indra kita, serta sebagian lainnya diperoleh dari pengolahan ingatan (memori) kita (diolah kembali berdasarkan pengalaman yang kita miliki).

Beberapa pengertian persepsi di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah tindakan penilaian dalam pemikiran seseorang setelah menerima stimulus dari apa yang dirasakan oleh pancaindranya. Stimulus tersebut kemudian berkembang menjadi suatu pemikiran yang akhirnya membuat seseorang memiliki suatu pandangan terkait suatu kasus atau kejadian yang tengah terjadi.

2.1.4.1. Jenis-Jenis Persepsi

Persepsi terbagi menjadi dua, yaitu persepsi terhadap objek (lingkungan fisik) dan persepsi terhadap manusia atau sosial. Persepsi terhadap manusia lebih sulit dan kompleks karena manusia bersifat dinamis. jenis persepsi ini memiliki perbedaan yaitu (Pinasti, 2010):

- a. Persepsi terhadap objek melalui lambang-lambang fisik, sedangkan terhadap manusia melalui lambang-lambang verbal dan nonverbal. Manusia lebih efektif daripada kebanyakan objek dan lebih sulit diramalkan
- b. Persepsi terhadap objek menanggapi sifat-sifat luar, sedangkan terhadap manusia menanggapi sifat-sifat luar dan dalam (perasaan, motif, harapan, dan sebagainya).
- c. Objek tidak bereaksi, sedangkan manusia bereaksi. Dengan kata lain, objek bersifat statis, sedangkan manusia bersifat dinamis. Oleh karena itu, persepsi terhadap manusia dapat berubah dari waktu ke waktu, lebih cepat daripada persepsi terhadap objek.

Persepsi manusia atau sosial adalah proses menangkap arti objek-objek sosial dan kejadian-kejadian yang kita alami dilingkungan kita. Setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda mengenai realitas disekelilingnya. Ada beberapa prinsip penting mengenai persepsi sosial, yaitu (Pratiwi dkk, 2019)

- a. Persepsi berdasarkan pengalaman yaitu persepsi manusia terhadap seseorang, objek, atau kejadian dan reaksi mereka terhadap hal-hal itu berdasarkan pengalaman dan pembelajaran masa lalu mereka berkaitan dengan orang, objek atau kejadian yang serupa
- b. Persepsi bersifat selektif. Setiap manusia sering mendapatkan rangsangan indrawi. Atensi kita pada suatu rangsangan merupakan faktor utama yang menentukan selektifitas kita atas rangsangan tersebut

- c. Persepsi bersifat dugaan. Terjadi karena data yang kita peroleh mengenai objek tidak pernah lengkap sehingga proses persepsi yang bersifat dugaan ini memungkinkan kita menafsirkan suatu objek dengan makna yang lebih lengkap dari suatu sudut pandang manapun
- d. Persepsi bersifat evaluatif. Artinya kebanyakan dari kita mengatakan bahwa apa yang kita persepsikan itu adalah suatu yang nyata akan tetapi, terkadang alat-alat indra dan persepsi kita menipu kita sehingga kita juga ragu seberapa dekat persepsi kita dengan realitas sebenarnya
- e. Persepsi bersifat kontekstual. Maksudnya bahwa dari semua pengaruh dalam persepsi kita, konteks merupakan salah satu pengaruh yang paling kuat. Ketika kita melihat seseorang, suatu objek atau suatu kejadian, konteks rangsangan sangat mempengaruhi struktur kognitif, pengharapan oleh karenanya juga persepsi kita.

Menurut penjelasan di atas kita dapat melihat bahwa kita terkadang melakukan kekeliruan dalam mempersepsikan lingkungan fisik. Kondisi mempengaruhi kita terhadap suatu benda. Misalnya ketika kita disuruh mencicipi sebuah minuman, mungkin pendapat kita akan berbeda dengan pendapat orang lain karena kita memiliki persepsi yang berbeda-beda. Sedangkan persepsi terhadap manusia yaitu proses menangkap arti objek-objek sosial dan kejadian yang kita alami dilingkungan kita, sebab setiap orang memiliki persepsi yang berbeda-beda terhadap lingkungan sosialnya.

2.1.4.2. Ciri-Ciri Persepsi

Agar dihasilkan suatu pengindraan yang bermakna, ada ciri-ciri umum tertentu dalam persepsi, ciri-ciri tersebut yaitu sebagai berikut (Pratiwi dkk, 2019):

- a. Modalitas: rangsang-rangsang yang diterima harus sesuai dengan modalitas tiap-tiap indra, yaitu sifat sensoris dasar dan masing-masing indra (cahaya untuk penglihatan; bau untuk penciuman; suhu bagi perasa; bunyi bagi pendengaran; sifat permukaan bagi peraba dan sebagainya).
- b. Dimensi ruang: persepsi mempunyai sifat ruang (dimensi ruang); kita dapat mengatakan atas bawah, tinggi rendah, luas sempit, latar depan latar belakang, dan lain-lain.
- c. Dimensi waktu: persepsi mempunyai dimensi waktu, seperti cepat lambat, tua muda, dan lain-lain
- d. Struktur konteks, keseluruhan yang menyatu: objek-objek atau gejala-gejala dalam dunia pengamatan mempunyai struktur yang menyatu dengan konteksnya. Struktur dan konteks ini merupakan keseluruhan yang menyatu
- e. Dunia penuh arti: persepsi adalah dunia penuh arti. Kita cenderung melakukan pengamatan atau persepsi pada gejala-gejala yang mempunyai makna bagi kita, yang ada hubungannya dalam diri kita.

Beberapa ciri-ciri persepsi di atas, kita dapat melihat bahwa alat-alat indra manusia sangat berpengaruh dalam proses pembentukan sebuah persepsi. Alat-alat indra yang dimiliki manusia menyebabkan manusia mampu berpikir, merasakan, dan memiliki persepsi tertentu mengenai dirinya dan dunia disekitarnya. Persepsi di mulaidengan adanya stimulus atau rangsangan dari luar alat indra kita. Dari stimulus tersebut alat indra kita kemudian memprosesnya sehingga kita dapat menentukan ataumenafsirkan informasi dari apa yang terjadi (Pujiana dkk, 2019).

2.1.4.3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

Proses persepsi, banyak rangsangan yang masuk ke panca indra namun tidak semua rangsangan tersebut memiliki daya tarik yang sama. Menurut Rhenal kasali, persepsi ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut (Pujiana dkk, 2019):

a. Latar belakang budaya

Persepsi itu terkait oleh budaya. Bagaimana kita memaknai suatu pesan, objek atau lingkungan bergantung pada sistem nilai yang kita anut. Semakin besar perbedaan budaya antara dua orang semakin besar pula perbedaan persepsi mereka terhadap realitas.

b. Pengalaman masa lalu

Audience atau khalayak, umumnya pernah memiliki suatu pengalaman tertentu atas objek yang dibicarakan. Makin intensif hubungan antara objek tersebut dengan audiens, maka semakin banyak pengalaman yang dimiliki oleh audiens. Selama audiens menjalin hubungan dengan objek, ia akan

melakukan penilaian. Pada produk-produk tertentu, biasanya pengalaman dan relasi itu tidak hanya di alami oleh satu orang saja, melainkan sekelompok orang sekaligus. Pengalaman masa lalu ini biasanya diperkuat oleh informasi lain, seperti berita dan kejadian yang melanda objek.

c. Nilai-nilai yang di anut

Nilai adalah komponen evaluatif dari kepercayaan yang dianut mencakup kegunaan, kebaikan, estetika, dan kepuasan. Nilai bersifat normatif, pemberitahu suatu anggota budaya mengenai apa yang baik dan buruk, benar dan salah, apa yang harus diperjuangkan, dan lain sebagainya. Nilai bersumber dari isu filosofis yang lebih besar yang merupakan bagian dari lingkungan budaya, oleh karena itu nilai bersifat stabil dan sulit berubah.

d. Berita yang dikembangkan

Berita-berita yang berkembang adalah berita-berita seputar produk baik melalui media massa maupun informasi dari orang lain yang dapat berpengaruh terhadap persepsi seseorang. Berita yang berkembang merupakan salah satu bentuk rangsangan yang menarik perhatian khalayak. Melalui berita yang berkembang di masyarakat dapat mempengaruhi terbentuknya persepsi pada benak khalayak.

Dari berita yang berkembang membuat khalayak mampu memberikan pengaruh baik secara sadar dan tidak sadar, hal ini mampu sampai kepada khalayak melalui beberapa tahapan dan untuk mengetahuinya maka digunakan Teori Stimulus Respons. Teori ini pada dasarnya merupakan reaksi atau efek secara stimulus tertentu dan menjelaskan bagaimana media massa itu mampu mempengaruhi khalayak sehingga sampai terjadi perubahan pada sikapnya. Dengan demikian seseorang dapat menjelaskan suatu prinsip yang sederhana, dimana efek merupakan reaksi terhadap stimulus tertentu (Julia dkk, 2022).

Teori ini menggambarkan proses komunikasi secara sederhana yang hanya melibatkan dua komponen media massa. Pengirim pesan, yaitu media penyiaran yang mengeluarkan stimulus, dan khalayak media massa sebagai penerima yang menanggapinya dengan menunjukkan respon sehingga dinamakan teori stimulus respons (Julia dkk, 2022).

Penelitian Wayuningtyas (2017) mengkaji tentang persepsi petani terhadap BUMDes yang terdiri dari 3 indikator yaitu:

- a. Tujuan BUMDes
- b. Pelaksanaan Kegiatan BUMDes
- c. Manfaat BUMDes

2.1.5. Partisipasi

Partisipasi merupakan suatu bentuk wujud nyata keikutsertaan dalam berbagai kegiatan daerah. Dimana partisipasi masyarakat ini bisa dijadikan sebagai tolak ukur bagi suatu daerah untuk mengembangkan dan mengetahui sejauh mana daerah bisa menggali potensi yang ada pada daerahnya. Keikutsertaan ini harus diapresiasi dan didukung baik oleh pemerintah dalam membawa iklim demokratis, sehingga dengan hal tersebut masyarakat akan merasa benar-benar terlibat dalam program-program daerah (Laily & Imro'atin, 2015).

Partisipasi nyata masyarakat merupakan suatu bentuk keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah dengan tujuan untuk meringankan beban program pembangunan daerah. Program pembangunan daerah dapat dikatakan sukses apabila bisa merasakan dampaknya secara langsung dan program pembangunan tersebut bersifat berkelanjutan dan diharapkan juga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ada pada daerah tersebut maupun sekitarnya (Sigalingging & Warijo, 2016)

Pada pernyataan (Sigalingging & Warijo, 2016) bahwa partisipasi dikategorikan dalam dua bentuk, yakni partisipasi sebagai cara dan partisipasi sebagai tujuan. Partisipasi sebagai cara merupakan bentuk pasif dari partisipasi dan berimplikasi pada penggunaan partisipasi dalam mencapai tujuan/sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Partisipasi sebagai cara, lebih menekankan pada capaian tujuan bukan pada kegiatan/program partisipasi itu sendiri dan masyarakat digerakan atau dilibatkan untuk meningkatkan efisiensi sistem

penyampaian. Pada umumnya partisipasi sebagai cara dipandang dalam jangka pendek. Berbeda dengan partisipasi yang sebagai tujuan, dimana bentuk partisipasi dipandang dalam proses jangka panjang dan partisipasi fokus pada peningkatan kemampuan rakyat untuk benar-benar berpartisipasi, dan menjamin untuk meningkatkan dan memberdayakan rakyat dalam inisiatif-inisiatif pembangunan.

Jadi dapat disimpulkan, bahwa bentuk partisipasi sebagai tujuan lebih melibatkan masyarakat secara penuh dan memberikan kepercayaan kepada pemerintah serta mendukung dalam memberdayakannya untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Berbeda dengan partisipasi sebagai cara dimana masyarakat dilibatkan untuk mencapai tujuan/sasaran yang telah ditetapkan dan didamping oleh pemerintah, partisipasi masyarakat disini bersifat pasif.

Partisipasi merupakan peran sekelompok masyarakat secara aktif dari proses perumusan kebutuhan, perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan kegiatan baik melalui pikiran atau langsung dalam bentuk tindakan secara fisik (Deviyanti, 2013). Beberapa pendapat dari para teoritis yang disebut oleh (Chambers, 2005) terkait bagaimana tingkat masyarakat berpartisipasi yaitu diantaranya menurut (Kanji & Greenwood, 2001), Dimana yang menjadi goal dalam pemikiran beberapa teoritis ini adalah partisipasi masyarakat yaitu timbulnya kemandirian masyarakat dalam mengontrol atau memobilisasi diri. Tingkat partisipasi bisa direncanakan atau disesuaikan dengan kondisi dan keadaan tergantung dari konteks dan kebutuhan. Dari model tingkat partisipasi diatas tidak ada yang menegaskan maupun yang mengklaim bahwa model partisipasi masyarakat diatas sebagai satu-satunya model yang benar dan otoritatif. Tingkat partisipasi menunjukkan

partisipasi bisa digunakan dalam kegiatan maupun dalam hubungan yang berbeda (Fadil, 2015)

Ada 8 tingkat partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah berdasarkan kekuasaan yang diberikan kepada masyarakat. Tingkat Partisipasi dari tertinggi ke rendah menurut pernyataan (Arnstein, 1969) dalam (Fadil, 2015) yaitu:

1. *Citizen Control*, masyarakat bisa secara langsung bertindak sebagai pengendali keputusan serta memiliki wewenang untuk mengadakan negosiasi dengan pihak luar. Pada tingkat ini masyarakat memiliki kekuatan untuk mengatur program/kelembagaan yang berkaitan dengan kepentingannya.
2. *Delegated Power*, masyarakat pada tingkatan ini diberikan limpahan wewenang untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah, mengadakan negosiasi dengan pihak luar (masyarakat) tanpa diktator atau tekanan oleh pemerintah.
3. *Partnership*, pada tingkatan ini masyarakat dan pemerintah membagi tanggungjawab dalam perencanaan, pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan serta pemecahan masalah yang dihadapi.
4. *Placation*, pemerintah (pemegang kekuasaan) mempunyai hak untuk menunjuk yang bagian dari masyarakat yang mempunyai pengaruh dalam akses pengambilan keputusan untuk menjadi anggota suatu badan publik.

5. *Consultation*, pada tingkatan ini masyarakat diberi ruang/kebebasan untuk mengemukakan pendapatnya, tetapi pendapat masyarakat tersebut tidak dijamin dapat dipertimbangkan. Metode ini sering digunakan sebagai survei tentang arah pikiran Masyarakat.
6. *Informing*, pada tingkatan ini masyarakat hanya menerima informasi dari pemegang kekuasaan dan informasi diberikan pada tahapan akhir perencanaan. Masyarakat hanya memiliki sedikit peluang untuk mempengaruhi susunan perencanaan tersebut
7. *Therapy*, masyarakat disini dibuat pura-pura ikut oleh pemerintah sebagai alasan untuk memperkuat proposal yang telah disusun oleh pemerintah. Meskipun masyarakat telah memberikan masukan tetapi pemerintah mengabaikan masukan tersebut, karena tujuan pemerintah disini yaitu untuk mengubah pola pikir masyarakat.
8. *Manipulation*, tingkat partisipasi yang terendah, pada partisipasi ini masyarakat dimanfaatkan untuk kepentingan pemerintah dalam memanipulasi informasi dan memperoleh dukungan publik dengan menjanjikan keadaan yang lebih baik meskipun hal tersebut tidak dilakukan.

Dari rincian penjelasan terkait tingkatan bentuk partisipasi masyarakat diatas, Arnstein membagi dalam 3 kelompok besar bentuk partisipasi yaitu, bentuk partisipasi masyarakat tidak ada meliputi *Manipulation*, *Therapy*, bentuk partisipasi masyarakat bersifat Simbolik meliputi *Consultation*, *Informing*, *Placation*), bentuk partisipasi masyarakat bersifat penuh meliputi *Citizen*, *Control* *Delegated Power*, *Partnership*.

Penelitian Hayuningtyas (2017) mengkaji tentang partisipasi dalam BUMDes terdiri dari 4 indikator yaitu:

- a. Pengambilan Keputusan dalam BUMDes
- b. Pelaksanaan Program BUMDes
- c. Pemantauan dan Evaluasi Program BUMDes

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Beberapa penelitian terdahulu sebagai acuan pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Hayuningtyas. 2017. Persepsi Dan Tingkat Partisipasi Petani Dalam Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar	Untuk mengukur persepsi petani dan tingkat partisipasi petani dalam BUMDes	Hasil penelitian menunjukkan persepsi petani berada dalam kategori baik pada aspek tujuan, pelaksanaan dan manfaat BUMDes. Tingkat Partisipasi berada dalam kategori sangat rendah pada tahap pengambilan keputusan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi, sedangkan pada tahap pemanfaatan hasil pada kategori sangat tinggi
2.	Diarti dan Legowo. 2020. Pengaruh Tingkat Persepsi Masyarakat Terhadap	pengaruh tingkat persepsi masyarakat terhadap partisipasi bergabung pada “BUMDes	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa “Terdapat Hubungan Signifikan Antara Tingkat Persepsi Masyarakat terhadap Partisipasi bergabung pada Badan Usaha

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
	Partisipasi Bergabung Pada Bumdes Se- Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik		Milik Desa”.
3.	Rismanita & Pradana 2022. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Jaya Tirta Desa Gedongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro	Menganalisis bentuk-bentuk partisipasi masyarakat Gedongarum pada BUMDes Jaya Tirta. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, keberadaan BUMDes dapat dirasakan manfaatnya baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Masyarakat juga terlibat aktif dalam pelaksanaan program, terutama dalam memberikan sumbangan tenaga dan materi. Walaupun dalam pengambilan keputusan keterlibatan masyarakat masih kurang, masyarakat cukup berpartisipasi dengan baik dalam memberikan evaluasi.
4.	Firmansyah. 2021. Persepsi Masyarakat terhadap pengaruh BUMDes Dalam pengembangan Ekonomi Masyarakat Di Desa Tanjung Medan Kabupaten Rokan	Menganalisis Persepsi Masyarakat terhadap pengaruh BUMDes Dalam pengembangan Ekonomi BUMDes Terhadap Pengembangan Ekonomi	Hasil penelitian diketahui dalam persepsi masyarakat terhadap BUMDes untuk Pengembangan Ekonomi, tinggi. Masyarakat mengatakan akan persepsinya sangat penting akan pengaruh BUMDes Syariah Kembang.

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
Hulu			
5.	Adinda dkk, 2021. Partisipasi Masyarakat Terhadap Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Harapan Masa Di Desa Pasar Lama Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar	Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat terhadap BUMDes.	Partisipasi masyarakat Desa Pasar Lama terhadap BUMDes Harapan Masa tergolong kategori sedang (67,58%). Partisipasi dalam perencanaan tergolong sedang (65%), partisipasi dalam pelaksanaan tergolong rendah (53%), partisipasi dalam pemanfaatan hasil tergolong tinggi (80%) dan partisipasi dalam evaluasi tergolong sedang (72%)

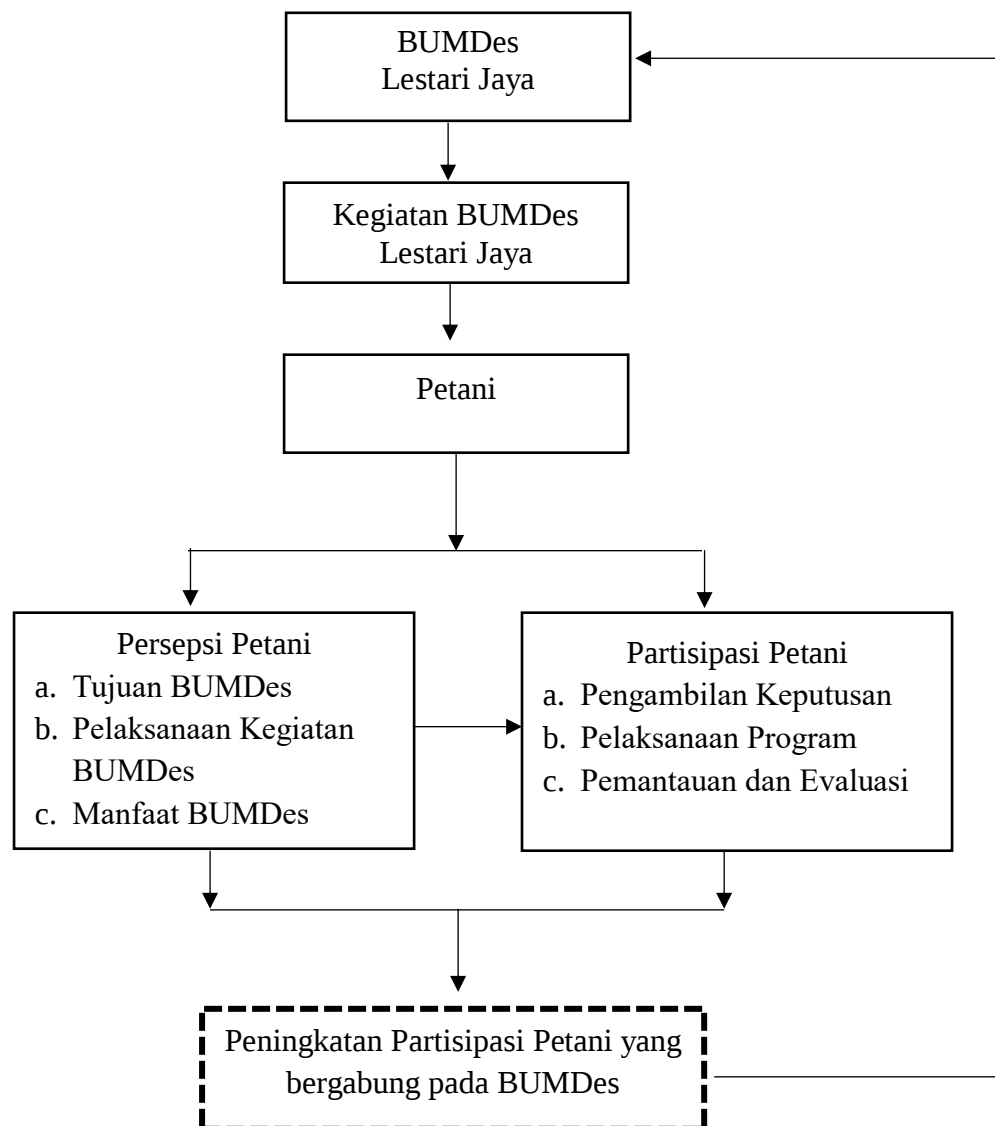
2.3 Kerangka Pikir Penelitian

Hadirnya BUMDes merupakan salah satu simbol dari upaya untuk mewujudkan ekonomi desa yang mandiri. BUMDes begitu penting bagi desa dan masyarakat, perannya akan begitu membantu dan memberikan manfaat. Ketika desa memiliki BUMDes banyak hal yang bisa dibangun guna meningkatkan perekonomian desa.

Desa Walal mempunyai BUMDes yang bernama BUMDes Lestari Jaya yang terbentuk pada Tahun 2017. Fungsi dari BUMDes Lestari Jaya ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan kampung Walal yang mempunyai potensi desa yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat nya, diantaranya potensi pengolahan lahan yang kosong untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, perdagangan, simpan pinjam

tanpa adanya bahan jaminan dan mengandalkan kepercayaan serta kegiatan lainnya yang bersifat memajukan aktivitas ekonomi kerakyatan masyarakatnya. Persepsi sebagai suatu proses yang dimulai dari penglihatan hingga terbentuk tanggapan yang terjadi dalam individu.

Kerangka pikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengetahui kegiatan apa saja yg BUMDes Lestari Jaya lakukan, kemudian mengetahui persepsi dan partisipasi masyarakat tani terhadap BUMDes Lestari Jaya.



Gambar 1 Kerangka Pikir Penelitian Persepsi dan Partisipasi Petani Dalam Usaha (BUMDes) Lestari Jaya (Studi Kasus di Desa Walal Distrik, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya)

Ket:

 : Tidak diteliti

2.4 Hipotesis

Berdasarkan permasalahan, tujuan dan kerangka pikir penelitian, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Persepsi petani terhadap BUMDes Lestari Jaya di Desa Walal Distrik Salawati, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Baik
2. Partisipasi terhadap BUMDes Lestari Jaya di Desa Walal Distrik Salawati, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, sedang.
3. Persepsi petani terhadap partisipasi dalam BUMDes Lestari Jaya berpengaruh Singnifikan.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Walal Distrik Salawati, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, pemilihan lokasi tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa daerah tersebut merupakan sumber pengembangan pertanian dan terdapat BUMDes. Waktu penelitian dilakukan selama 3 bulan sejak bulan November 2023 – Januari 2024.

3.2. Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel dalam suatu penelitian perlu ditetapkan dengan tujuan agar penelitian yang dilakukan benar-benar mendapatkan data sesuai yang diharapkan. Populasi dalam penelitian ini adalah petani yang masuk sebagai anggota dalam BUMDes yang berjumlah sebanyak 65 orang (Informasi dari kantor Desa Walal Distrik Salawati, Kabupaten Sorong). Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Adapun yang akan menjadi informan dalam penelitian ini terdiri dari 5 orang yaitu penasehat, pengawas, ketua, sekretaris dan bendahara pada BUMDes Lestari Jaya.

Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode sensus yaitu metode penarikan sampel jika semua populasi di jadikan sebagai sampel. Jumlah sampel yang akan di ambil adalah petani yang masuk sebagai anggota dalam BUMDes di Desa Walal Distrik Salawati, Kabupaten Sorong sebanyak 65 orang.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan selama penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Data primer, yaitu data yang secara langsung didapatkan di lapangan wawancara langsung dengan para responden dengan menggunakan kuesioner (daftar pertanyaan tertulis) yang telah disiapkan.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari beberapa referensi-referensi dokumen yang didapatkan dan berhubungan dengan objek penelitian baik berupa data dari internet, buku, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian.

3.4. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi yaitu pengambilan data yang dapat dilakukan melalui pengamatan langsung pada petani.
2. Wawancara yaitu pengumpulan data primer dengan mengajukan pertanyaan yang sistematis dan langsung kepada responden dengan menggunakan alat bantu pedoman wawancara yaitu kuesioner untuk memudahkan dalam proses penelitian.
3. Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengambil gambar pada kegiatan yang dilakukan selama di tempat penelitian.

3.5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini melibatkan dua metode utama, yaitu analisis data deskriptif dan regresi linear berganda. Analisis data deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang data yang ada, seperti sebaran data dan ukuran pemusatan data. Sementara itu, analisis regresi sederhana membantu mengidentifikasi hubungan antara dua atau lebih variabel *independent* dengan satu variabel *dependen*.

3.4. Analisis Deskriptif Kuantitatif

Analisis deskriptif merupakan suatu bentuk analisis yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya (Sukmadinata, 2006).

Analisis deskriptif untuk menjawab tujuan pertama, kedua dan ketiga yaitu mendeskripsikan usaha apa saja yang dikembangkan BUMDes, menganalisis persepsi petani terhadap BUMDes dan menganalisis partisipasi petani dalam BUMDes Lestari Jaya di Desa Walal Distrik Salawati, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi dan interval.

Tabel 2. Indikator Persepsi Petani Terhadap Partisipasi dalam BUMDes

Variabel	Indikator	Pertanyaan
Persepsi Petani (X)	a. Tujuan BUMDes b. Pelaksanaan Kegiatan BUMDes c. Manfaat BUMDes	a. Tujuan BUMDes Lestari Jaya sudah sesuai. b. Tujuan BUMDes sangat menguntungkan untuk masyarakat tani c. Pelaksanaan kegiatan samprodi BUMDes Lestari Jaya sepenuhnya dijalankan d. Pihak BUMDes mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan saprodi BUMDes e. BUMDes bermanfaat bagi petani f. Hasil pelaksanaan pengelolaan program BUMDes sudah melakukan transparansi (keterbukaan) kepada masyarakat tani

Variabel	Indikator	Pertanyaan
Partisipasi dalam BUMDes (Y)	a. Pengambilan keputusan dalam BUMDes b. Pelaksanaan program BUMDes c. Pemantauan dan evaluasi program BUMDes	a. Berpartisipasi dalam pengambilan keputusan BUMDes b. Berkontribusi dalam hal rapat, sumbangan pemikiran dan tanggapan c. BUMDes sudah terlaksana dengan baik d. Pelaporan pelaksanaan program BUMDes sudah terlaksana dengan baik e. Program BUMDes selalu di pantau atau di evaluasi f. Pelaksanaan pengawasan sudah berjalan dengan Efektif

Sumber: Hasil Modifikasi Dari Hasil Penelitian Hayuningtyas (2017).

Jawaban responden terhadap variabel yang diteliti digunakan untuk mencari data yang akurat dengan menggunakan skala. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah Skala *Likert* yaitu skala untuk mengukur sikap, pendapat, opini persepsi seseorang yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial. Penelitian ini menggunakan pertanyaan tertutup dengan rentang skala penilaian sebagai berikut:

Sangat tidak setuju : 1
 Tidak setuju : 2
 Cukup setuju : 3
 Setuju : 4
 Sangat setuju : 5

Agar mendapatkan interpretasi pembobotan setiap indikator, terlebih dahulu harus diketahui nilai skor tertinggi (maksimal).

A. Kriteria Indikator Persepsi Petani dan Partisipasi Petani

$$\text{Skor Maksimal} = \text{Jumlah Responden} \times \text{Skor Tertinggi Likert} \times \text{Jumlah Indikator}$$

$$= 65 \times 5 \times 1$$

$$= 325$$

$$\text{Skor Minimum} = \text{Jumlah Responden} \times \text{Skor Terendah Likert} \times \text{Jumlah Indikator}$$

$$= 65 \times 1 \times 1$$

$$= 65$$

$$\text{Interval} = \frac{\text{Skor Maksimal} - \text{Skor Minimal}}{\text{Banyak Kelas}}$$

$$= \frac{325 - 65}{3}$$

$$= 87$$

Tabel 3. Skor Pembobotan Indikator Persepsi dan Partisipasi Petani

Skor	Keterangan
65 – 151	Kurang Baik
152 – 237	Baik
238 – 325	Sangat Baik

B. Kriteria Rekapitulasi Persepsi dan Partisipasi Petani

Skor Maksimal = Jumlah Responden x Skor Tertinggi Likert x Jumlah Indikator

$$= 65 \times 5 \times 6$$

$$= 1.950$$

Skor Minimum = Jumlah Responden x Skor Terendah Likert x Jumlah Indikator

$$= 65 \times 1 \times 6$$

$$= 390$$

$$\text{Interval} = \frac{\text{Skor Maksimal} - \text{Skor Minimal}}{\text{Banyak Kelas}}$$

$$= \frac{1.950 - 390}{3}$$

$$= 520$$

Tabel 4. Skor Pembobotan Rekapitulasi Persepsi dan Partisipasi Petani

Skor	Keterangan
390– 909	Kurang/Rendah
910 – 1.429	Baik/Sedang
1.430 – 1.950	Sangat Baik/Tinggi

3.4. Analisis Regresi Sederhana

Analisis regresi sederhana untuk mengetahui pengaruh persepsi petani terhadap partisipasi petani dalam BUMDes. Sebelum melakukan analisis regresi terlebih dahulu melakukan uji validitas, uji reliabilitas dan uji normalitas data.

a. Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat valid dan ketetapan suatu instrumen. Artinya instrumen tersebut mampu mengukur apa yang diinginkan. Data yang valid adalah data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

1. Jika $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$ (uji dua sisi dengan signifikansi 0,05) maka instrument atau item pertanyaan berkorelasi signifikansi terhadap skor total (dinyatakan valid).
2. Jika $r \text{ hitung} \leq r \text{ tabel}$ (uji dua sisi dengan signifikasi 0,05) maka instrument atau item pertanyaan tidak berkorelasi signifikansi terhadap skor total (dinyatakan tidak valid).

b. Uji Reliabilitas

Setelah mendapatkan data validitas alat ukur, kemudian dilakukan uji reliabilitas yang bertujuan untuk melihat seberapa besar tingkat keandalan terhadap alat ukur tersebut. Tujuan dari uji reliabilitas adalah untuk mengukur sejauh mana hasil pengukuran bersifat tetap, dapat dipercaya serta terbebas dari *measurement error*. Kriteria dalam mengambil keputusan reabilitas yaitu, jika nilai $\alpha > 0,60$ pada tingkat signifikansi 5% (Sugiono, 2016).

c. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah pada suatu mode regresi, suatu variabel independen dan variabel dependen ataupun keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Apabila suatu variabel tidak berdistribusi secara normal, maka hasil uji statistik akan mengalami penurunan. Signifikasi di atas 5% atau 0,05 maka data memiliki distribusi normal. Sebaliknya, jika dihasilkan nilai signifikan dibawah 5% atau 0,05 maka data tidak memiliki distribusi normal.

Penelitian ini menggunakan program SPSS V.26 untuk membantu memudahkan dalam menganalisis data dengan menggunakan uji regresi linear berganda.

d. Regresi Sederhana

Regresi linear berganda merupakan suatu linear yang menjelaskan ada tidaknya suatu pengaruh fungsional dan meramalkan pengaruh variabel indenpenden (X) atau terhadap variabel dependen (Y). Analisis regresi linear berganda, akan digunakan X yang menggambarkan seluruh variabel yang termasuk di dalam analisis dan variabel dependen. Berikut merupakan persamaan analisis regresi liner berganda:

$$Y = a + b_1X + e$$

Di mana:

Y	= Partisipasi dalam BUMDes
a	= Nilai Konstan
b	= Koefisien Regresi
X	= Persepsi Petani

Uji Varians

a. Koefisien determinasi

Koefisien determinasi adalah pengujian regresi yang digunakan untuk mengetahui besar pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Uji koefisien determinasi diperoleh dari nilai R^2 .

b. Uji-F (serempak)

Uji-F adalah pengujian koefisien regresi yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) secara bersamaan mempengaruhi variabel dependen (Y). Cara melakukan Uji-F yaitu, menggunakan tingkat kepercayaan 95% atau 0,05. Jika nilai F hasil uji signifikansi (secara bersamaan) $<$ dari 0,05 dapat dikatakan signifikan variabel independen (X) mempengaruhi variabel dependen (Y). Jika nilai F hasil uji signifikansi (secara bersamaan) $>$ dari 0,05 dapat dikatakan tidak signifikan variabel independen (X) mempengaruhi variabel dependen (Y).

c. Uji-t (parsial)

Uji-t adalah pengujian koefisien regresi yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) secara individual mempengaruhi variabel dependen (Y). Cara melakukan Uji-t yaitu, menggunakan tingkat kepercayaan 95% atau 0,05. Jika nilai t hasil uji signifikansi (secara individual) $\leq$ dari 0,05 dapat dikatakan signifikan variabel independen (X) mempengaruhi variabel dependen (Y). Jika nilai t hasil uji signifikansi (secara individual) $>$ dari 0,05.

3.6. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan cara untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan hasil penelitian, maka dibuat penjelasan dan batasan operasional sebagai berikut:

1. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat tani yang bergabung dengan BUMDes Lestari Jaya di Walal Distrik Salawati, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.
2. Sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat tani yang terpilih untuk dijadikan responden yang berjumlah sebanyak 65 orang.
3. Masyarakat tani adalah petani yang bergabung dengan BUMDes Lestari Jaya dan melaksanakan program BUMDes Lestari Jaya.
4. Persepsi adalah penilaian masyarakat tani terhadap BUMDes Lestari Jaya
5. Tujuan BUMDes ialah Tercapainya visi misi BUMDes Lestari Jaya
6. Pelaksanaan Kegiatan BUMDes ialah kegiatan yang dilakukan oleh BUMDes Lestari Jaya
7. Manfaat BUMDes dampak yang dirasakan petani terhadap BUMDes Lestari Jaya
8. Partisipasi adalah ikut sertanya petani dalam BUMDes
9. Pengambilan Keputusan dalam BUMDes ialah tindakan yang petani lakukan dalam BUMDes Lestari Jaya
10. Pelaksanaan Program BUMDes ialah terlaksananya kegiatan BUMDes Lestari Jaya

11. Pemantauan dan Evaluasi Program BUMDes ialah pengamatan serta penilaian terhadap kegiatan BUMDes Lestari Jaya

IV. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Sejarah Berdirinya BUMDes Lestari JAYA

Berdasarkan musyawarah desa pada tanggal 15 Januari tahun 2016 di Desa Walal Distrik, Kabupaten Sorong Papua Barat telah terbentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diberi nama “BUMDes Lestari Jaya”. Tujuan didirikan BUMDes ini adalah untuk mensejahterakan ekonomi masyarakat. Pembentukan BUMDes Lestari Jaya dimaksudkan untuk mengelola usaha, memanfaatkan asset, mengembangkan investasi dan produktivitas menyediakan jasa pelayanan dan menyediakan jenis usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa Walal.

Modal awal yang dimiliki BUMDes Lestari Jaya ini berasal dari bantuan dana desa sebesar RP.48.143.000 dan dana hibah dari masyarakat Desa Walal serta pengelola BUMDes Lestari Jaya (Laporan Keuangan BUMDes, 2016). Pelaksanaan program kegiatan BUMDes Lestari Jaya ini dilakukan melalui kegiatan yang dilakukan dengan perencanaan Bersama terlebih dahulu antara seluruh masyarakat walal, pengurus BUMDes Lestari Jaya dan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan ini akan dilaksanakan secara langsung oleh pengelola kemudian menunggu dana desa serta dana hibah masyarakat yang ingin membantu. Kemudian kegiatan ini dimonotoring langsung secara ketat oleh Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), Dinas Pemberdayaan, Pihak Kepolisian, Aparat Pemerintah baik Distrik dan Aparat Desa. Unit usaha yang dikelola oleh BUMDes Lestari Jaya adalah:

- a. Unit usaha pertanian
- b. Unit usaha simpan pinjam
- c. Penyediaan sembako dan agen minyak tanah
- d. Kegiatan penyuluhan
- e. Pelatihan kewirausahaan

4.2. Visi dan Misi BUMDes Lestari JAYA

BUMDes Lestari Jaya dibentuk dengan maksud untuk mendorong dan menampung seluruh kegiatan ekonomi masyarakat desa yang berkembang sesuai adat istiadat atau budaya setempat untuk dapat dikelola bersama oleh Pemerintah Desa dan masyarakat dengan visi “Meningkatkan Kegiatan Perekonomian Untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa Walal”

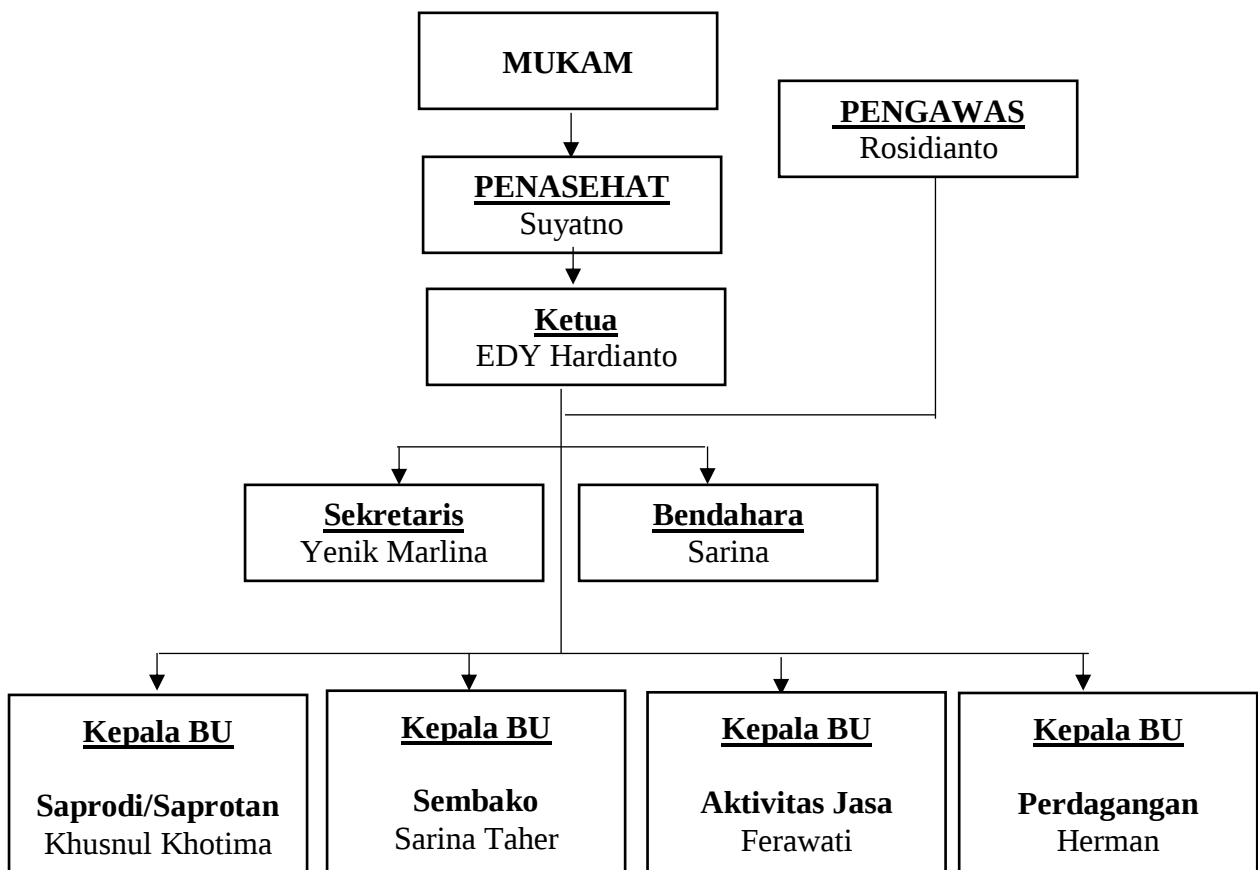
Misi BUMDes Lestari Jaya adalah sebagai berikut:

- a. Terlaksananya kegiatan perdagangan umum dan eceran berbasis kebutuhan masyarakat
- b. Terbantunya pemenuhan kebutuhan barang dan jasa masyarakat
- c. Tumbuhnya kemitraan kegiatan ekonomi berbasis masyarakat
- d. Tersedianya lapangan pekerjaan bagi masyarakat
- e. Terlaksananya kegiatan pertanian dan nelayan perikanan

4.3. Struktur Organisasi dan SDM BUMDes Lestari Jaya

4.3.1. Stuktur Organisasi

Struktur organisasi menggambarkan kerangka dan susunan hubungan di antara fungsi, bagian atau posisi, juga menunjukkan hierarki organisasi dan struktur sebagai wadah untuk menjalankan wewenang, tanggung jawab dan sistem pelaporan terhadap atasan dan pada akhirnya memberikan stabilitas dan kontinuitas yang memungkinkan organisasi tetap hidup walaupun orang datang dan pergi serta pengkoordinasian hubungan dengan lingkungan. Struktur organisasi dapat menghindari atau mengurangi kesimpangsiuran dalam pelaksanaan tugas (Mahardika dkk, 2023).



Gambar 1. Struktur Organisaasi BUMDes Lestari Jaya

4.3.2. Sumberdaya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan asset organisasi yang sangat vital, karena itu peran dan fungsinya tidak bisa digantikan oleh sumber daya lainnya. Seberapa modern teknologi yang digunakan, atau seberapa banyak dana yang disiapkan, namun tanpa sumber daya manusia yang profesional semuanya menjadi tidak bermakna. Berikut daftar Sumberdaya Manusia BUMDes Lestari Jaya:

Tabel 5. Daftar Sumberdaya Manusia BUMDes Lestari Jaya:

No	Nama	Jabatan
1.	Suyatno	Penasehat
2.	Rosidianto	Pengawas
3.	Edy Hardianto	Ketua
4.	Yenik Marlina	Sekretaris
5.	Sarina	Bendahara

Sumber: BUMDes Lestari Jaya, 2023

Adapun tugas dan tanggung jawab dari masing-masing pihak, yakni sebagai berikut:

1. Suyatno sebagai penasehat seseorang yang diangkat dan diberhentikan langsung oleh Kepala Desa. Penasehat akan melakukan tugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional
2. Rosidianto sebagai pengawas memiliki tugas Menjalankan dan mengawasi manajemen secara umum, jika dalam pengelolaan BUMDes Lestari Jaya terjadi kendala, pengawas melakukan diskusi, pembinaan dan konsultasi.

3. Edy Hardianto sebagai ketua memiliki tugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUMDes dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMDes Lestari Jaya serta mewakili BUMDes Lestari Jaya di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUMDes Lestari Jaya.
4. Yeknik Marlina sebagai sekretaris memiliki tugas mampu membuat rancangan bagaimana hasil rapat harus didelegasikan pada bagian-bagian yang berkaitan. Sekretaris juga menghubungkan seluruh catatan proses kinerja perusahaan menjadi sebuah konsepsi yang berkesinambungan satu sama lain.
5. Sarina sebagai bendahara memiliki tugas mengurus pembukuan keuangan BUMDes serta memberikan laporan tentang perkembangan kegiatan usaha BUMDes Lestari Jaya.